

## Implementasi Kebijakan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

**Tresnawati**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

e-mail : [tresnawati64@gmail.com](mailto:tresnawati64@gmail.com)

### Abstrak

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai tempat untuk menghimpun, menyimpan, dan melestarikan serta mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang di hasilkan di wilayah Jawa Barat, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dimana setiap perusahaan yang masihkan karya cetak dan karya rekam wajib menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah sesuai dengan domisi penerbit tersebut. Tetapi sampai saat ini, masih banyak penerbit baik pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi yang belum mengetahui adanya undang-undang ini, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Hal ini terjadi karena masih adanya kendala pada komunikasi, sumber daya, disposisi, atau struktur birokrasi.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan serah simpan karya cetak dan karya rekam

## *Policy Implementation On The Submission And Retention Of Printed And Recorded Works At The West Java Regional Library And Archives Office*

### Abstract

*The West Java Regional Library and Archives Office functions as a place to collect, store, and preserve as well as utilize all printed and recorded works produced in the West Java region. This function represents the implementation of the Law Number 4 of 1990 concerning Submission and Retention of Printed and Recorded Works, where each institution that produces printed and recorded works must submit their printed and recorded works to the Provincial Library in accordance with the domicile of the publisher. However, many publishers both public and private and universities have not recognized the law. As a result, some of them have not performed their obligations to submit their printed and recorded works as mandated in the law. This happens due to some constraints in the aspects of communication, resources, disposition, or bureaucratic structure.*

**Keywords:** West Java Province, DISPUSIPDA deposit library

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amanah undang-undang tersebut menegaskan bahwa perpustakaan memiliki arti penting dalam upaya pemerintah mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari masa kemasa perpustakaan terus berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk itu keberadaan dan berbagai inovasi dalam pengelolaan perpustakaan harus terus diupaya dan dikembangkan dalam menunjang kinerja perpustakaan. Perpustakaan juga dapat difungsikan secara optimal dengan melakukan hal-hal yang mendukung upaya pelestarian bentuk fisik warisan budaya sekaligus pesan moral yang melingkupinya.

Pentingnya melestarikan karya budaya bangsa diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Cetak pada tanggal 9 Agustus 1990 dan lembaga yang diberi amanat untuk melaksanakan undang-undang tersebut adalah Perpustakaan Nasional RI yang berkedudukan di Ibukota Negara untuk menghimpun, menyimpan, dan melestarikan serta mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan penghimpunan dan pelestarian serta pendayagunaan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah di tiap ibukota provinsi.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, setidaknya dari perspektif normatif menunjukkan bahwa penghimpunan, pelestarian dan pendayagunaan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan menjadi suatu masalah publik yang penting dalam perspektif mengatur dan mengurus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga butuh suatu kebijakan tertentu untuk menanganinya,

dan pada konteks pemerintahan daerah, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah.

Untuk melanjutkan atau mengoperasionalkan perintah undang-undang tersebut di atas, maka DISPUSIPDA sebagai salah satu lembaga teknis yang terkait dengan perpustakaan maka memiliki kewenangan untuk mengadakan Layanan Deposit. Layanan deposit adalah layanan kepada paengguna jasa perpustakaan yang terdiri dari koleksi-koleksi khusus terbitan daerah. Itu berarti bahwa Karya Cetak dan karya Rekam (KCKR) yang dihasilkan di daerah menjadi kewajiban DISPUSIPDA untuk memberi jasa layanan dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan pemantauannya.

Saat ini DISPUSIPDA telah melaksanakan penghimpunan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan, dan pemantauan KCKR di wilayah Jawa Barat. Adapun koleksi deposit yang ada di sini adalah Literatur Tentang Jawa Barat berjumlah 2.361 judul dan 6.584 eksemplar, Hasil implementasi UU No. 4 Tahun 1990 berjumlah 6.154 judul dan 6.584 eksemplar, Koleksi digital berjumlah 369 judul dan 369 eksemplar, Majalah berjumlah 151 judul dan 1.096 eksemplar, koran berjumlah 96 judul dan 96 eksemplar.

Banyaknya buku hasil implementasi UU No 4 Tahun 1990 yang terdata di atas, merupakan kontribusi dari berbagai penerbit yang ada di Jawa Barat. Mengenai data penerbit yang telah memberikan hasil KCKR nya ke DISPUSIPDA dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data penerbit yang telah memberikan hasil KCKR

No	Tahun	Penerbit		
		Pemerintah	Swasta	Perguruan Tinggi
1	2016	26	100	20
2	2017	26	107	23
3	2018	39	150	19

Sumber : Bapusipda Jabar 2018

Berdasarkan tabel 1, dapat dipahami bahwa dari waktu ke waktu pada periode 2016-2018 jumlah penerbit yang menyerahkan implementasi KCKR ke DISPUSIPDA terus meningkat baik itu penerbit pemerintah maupun swasta. Sedangkan untuk penerbit dari perguruan tinggi terjadi fluktuatif, naik turun, seperti di tahun 2016 berjumlah 20

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

penerbit, tahun 2017 naik menjadi 23 penerbit tapi pada tahun 2018 turun menjadi 19 penerbit.

Data tersebut jika dibandingkan dengan kondisi eksisting data penerbit yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, nampaknya bahwa kinerja penyerahan karya cetak dan karya rekam oleh penerbit ini rata-rata pencapaiannya belum sesuai yang diharapkan. Misalnya untuk penerbit swasta, capaiannya di bawah 61%, jumlah eksisting penerbit yang ada adalah berjumlah 248 penerbit yang tersebar di kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, sementara yang baru menyerahkan karya cetak dan karya rekam ke DISPUSIPDA berjumlah 150 (2018). Sedangkan untuk penerbit pemerintah lebih buruk lagi kurang dari 5 % dari 936 penerbit hanya 39 (2018) yang telah menyerahkan karya cetak dan karya rekam. Sedangkan untuk penerbit dari perguruan tinggi, capainya dibawah 64 % dari jumlah eksisting ada 30 penerbit yang telah menyerahkan karya cetak dan karya rekam berjumlah 19(2018).

Dengan memperhatikan capaian kinerja terkait dengan penyerahan KCKR yang disampaikan di halaman sebelumnya, maka menjadi suatu persoalan yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan suatu kajian yang mendalam, mengapa implementasi kebijakan tentang penyerahan karya cetak dan karya rekam ini belum terlaksana sesuai dengan harapan normatif dari peraturan perundang-undang tersebut dan solusi apa yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan kesadaran para penerbit untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam ke DISPUSIPDA.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori dari Goerge C. Edward III, menurut beliau faktor-faktor yang digunakan untuk menganalisis meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Peneliti juga akan menganalisis berbagai kendala dalam implementasi kebijakan serta simpan KCKR dan pengembangan model layanan deposit sebagai model solusi untuk meningkatkan kinerja implementasi kebijakan serah simpan KCKR di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat.

## B. PEMBAHASAN

Pada pembukaan telah diuraikan berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan KCKR di DISPUSIPDA Provinsi Jawa

Barat, untuk menjelaskan dan menganalisis lebih jauh terkait permasalahan itu peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif, alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis pada dasarnya bertujuan untuk memahami dan menjelaskan proses implementasi kebijakan mengenai serah simpan KCKR. Peneliti akan memotret dan memahami serta memaknai berbagai data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan kondisi apa adanya, tidak dipengaruhi manipulasi dari peneliti sehingga keadaan saat peneliti memasuki, berada dan keluar dari objek penelitian relatif tidak mengalami perubahan (Herdiansyah, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti langsung sebagai instrumen atau alat penelitian (human instrument). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Teknik verifikasi data pada penelitian kualitatif akan menggunakan empat teknik verifikasi data (Creswell: 2009), yaitu: triangulasi, member check, klarifikasi bias dan external auditor. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh selanjutnya pendahuluan. diolah dan dianalisis data kualitatif menggunakan 4 (empat) tahapan yaitu dimulai dari proses pengumpulan data (data collection), proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan terakhir penyusunan kesimpulan (conclusion drawing) (Miles dan Huberman: 1994).

Dalam penelitian ini, penentuan sumber data/informan yang diambil pada situasi sosial berdasarkan *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan), maka yang akan menjadi informan adalah orang-orang yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati (Sugiyono, 2007: 57).

Pada dasarnya tidak satupun organisasi yang tidak menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugasnya, banyak sekali permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, namun seharusnya tidak harus terpaksa pada masalah itu tapi kita harus berupaya mencari jalan keluarnya untuk mengatasi masalah dan mengantisipasi masalah itu. Berdasarkan hasil penelitian implementasi/pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1990, ada beberapa upaya yang dijalankan atau dilaksanakan oleh Dispusipda, diantaranya:

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

1. Untuk mengatasi masalah mengenai masih ada penerbit pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi yang belum mengetahui dan memahami adanya UU ini. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat, Bapak H. Riadi sebagai berikut:

Memang saat ini DISPUSIPDA masih kurang gencar dalam mensosialisasikan UU tersebut, sehingga masih banyak penerbit baik pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi yang belum mengetahui adanya kebijakan serah simpan KCKR sehingga mereka belum melaksanakan kewajibannya selaku wajib simpan.

Begitu juga seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan (PDPBP), Bapak Yudi Ridwan, sebagai berikut:

Kami mungkin harus lebih giat lagi untuk mensosialisasikan UU ini secara efektif tidak hanya lewat seminar saja tetapi harus juga menggunakan media sosial. Karena jika hanya mengandalkan seminar saja tidak akan efektif, masalahnya seminar diadakan hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa DISPUSIPDA kurang mempromosikan adanya UU No. 4 Tahun 1990, sehingga masih banyak penerbit yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu DISPUSIPDA terus melakukan sosialisasi dengan mengadakan seminar ataupun workshop dan mengirim surat pemberitahuan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 kepada penerbit pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi.

2. Kurang kesadaran dari penerbit dalam memenuhi kewajibannya selaku wajib serah simpan KCKR, seperti yang diungkapkan oleh Kabid PDPBP, sebagai berikut:

Mungkin ada penerbit yang sudah mengetahui UU ini tapi mereka belum ada kesadaran untuk menyerahkan hasil KCKRnya ke DISPUSIPDA.

Hunting memang sering kami lakukan jika penerbit itu belum juga melaksanakan UU ini. Setelah kami datang biasanya mereka akan beralasan belum mengetahui bahwa ada peraturan

seperti itu.

Ada juga penerbit yang sudah mengetahui UU ini tapi mereka beralasan bahwa belum sempat untuk mengirimkan hasil KCKR mereka.

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Kepala DISPUSIPDA, sebagai berikut:

Masih banyak penerbit-penerbit di Jawa Barat yang belum memiliki kesadaran untuk menyerahkan KCKR nya dan belum mengetahui manfaat dari menyerahkan KCKR kepada perpustakaan provinsi. Tetapi kami mensiasati itu dengan langsung berkunjung atau jemput bola ke tempat penerbit yang sesuai dengan daftar yang ada di Perpustakaan Nasional RI.

Untuk mengatasi masalah di atas, maka yang dilakukan oleh DISPUSIPDA adalah melaksanakan hunting ke tempat di mana penerbit itu berada, sekaligus jemput bola kepada penerbit yang belum menyerahkan KCKR nya.

3. Belum ada sanksi yang tegas diberikan kepada penerbit bagi yang tidak menyerahkan KCKR nya ke DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat yang mengakibatkan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala DISPUSIPDA, sebagai berikut:

Memang saat ini kami belum ada sanksi yang tegas kepada para penerbit yang tidak mengindahkan UU ini. Mungkin sanksi saat ini hanya masih berupa himbauan atau teguran secara lisan saja.

Menanggapi persoalan tersebut Kadis menganggap perlu Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dicantumkan bahwa bagi para pelanggar wajib serah simpan KCKR didenda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 atau kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan, sehingga keberadaan undang-undang tersebut tidak berjalan efektif meski sudah sering dilakukan sosialisasi. Karena sanksi UU ini kurang tegas dan tidak dijalankan, maka kesan UU ini hanya sebagai himbauan saja. Sehingga penerbit acuh tidak acuh dengan adanya undang-undang ini.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis mengambil kesimpulan:

1. Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sudah dilaksanakan oleh DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat, tetapi belum dikatakan efektif dikarenakan masih memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi oleh DISPUSIPDA dalam implementasi undang-undang tersebut. Padahal sudah dilaksanakan sosialisasi lewat seminar dan mengirim surat pemberitahuan tentang serah simpan KCKR kepada para penerbit di Jawa Barat.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 masih banyak para penerbit yang masih kurangnya kesadaran dalam menyerahkan hasil KCKR nya, padahal mereka sudah mengetahui adanya undang-undang itu, tetapi mereka belum juga memiliki kesadaran, sehingga DISPUSIPDA melakukan hunting dan mendatangi langsung ke tempat penerbitan dan jemput bola.

### Rekomendasi

Tegakan sanksi yang tegas bagi para penerbit yang masih belum memiliki kesadaran untuk menyerahkan KCKR nya. Sebaliknya DISPUSIPDA harus memberikan reward bagi para wajib serah simpan.

## REFERENSI

- Basuki, Sulisty. ( 1991). Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cresswel, J.W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitave, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). New Jersey, Person.
- Kerr, S. 2003. *The Best Laid Incentive Plans*. Harvard Business Review, Vol 81 (1), p 27-37.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994)*Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publishers.
- Anderson, G. 1996. *Performance Appraisal*. In: Towers B (ed), *The Handbook of Human Resource Management*, Second Edition. Cambridge: Blackwell. p 196-220.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Indonesia. (2009). *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*. Retrieved from Mulyono: <https://mulyono.staff.uns.ac.id>